

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kinerja camat menurut Jamharis sangatlah penting. Adanya kinerja camat yang baik diharapkan dapat membuat wilayah kecamatan tersebut menjadi maju. Kecamatan Sewon yang merupakan bagian dari kecamatan di Kabupaten Bantul juga diharuskan untuk memberikan laporan kinerjanya secara lengkap kepada kabupaten tersebut.¹

1. *Quantity of Work*

Melihat banyaknya permasalahan pada bidang agraria, seperti yang dijelaskan pada latar belakang masalah, dari pihak kecamatan sewon kabupaten bantul yakni Kasi Pelayanan Umum bapak Pujiyanto telah memberikan beberapa penyelesaian.

Pujiyanto menjelaskan bahwa jumlah pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sewon sudah cukup banyak. Berikut penjelasannya :

Berkaitan dengan keagrariaan maka kecamatan ini pada tahun 2013 sudah mengadakan berbagai kegiatan. Antara lain adalah penyuluhan tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah, pengecekan kondisi tanah yang dilakukan bekerjasama dengan kantor agraria, serta penyuluhan pemberdayaan tanah desa yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali.²

¹ Helmi Jamharis, Camat Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

² Pujiyanto, Kasi Pelayanan Umum, Wawancara Tanggal 28 April 2014.

Nampak bahwa Kecamatan Sewon sudah melakukan berbagai kegiatan keagrariaan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Kegiatan Keagrarian di Kecamatan Sewon³

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	3 Februari 2013	Penyuluhan tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah.	Aula Kecamatan Sewon.
2	16-18 Maret 2013	Pengecekan kondisi tanah.	Wilayah Kecamatan Sewon.
3	21 Maret 2013	Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap I.	Aula Kecamatan Sewon.
	25 Mei 2013	Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap II.	Aula Kecamatan Sewon.
	30 Agustus 2013	Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap III.	Rumah Makan Parangtritis.
	17 November 2013	Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap IV.	Hotel Pondok Gajah.
4	Setiap tahun 3 x	Pengecekan hama penyakit tumbuhan di Kecamatan Sewon.	Pertanian di wilayah Sewon.

Penyuluhan tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah dilakukan di Aula Kecamatan Sewon pada tanggal 03 Februari 2013. Penyuluhan ini menurut Helmi Jamharis penting dilakukan mengingat tanah yang ada di Kecamatan Sewon sangat luas dan banyaknya masyarakat luar wilayah kecamatan tersebut yang membeli tanah di Kecamatan Sewon.⁴

³ Data Administrasi Kecamatan Sewon 2013.

⁴ Helmi Jamharis, Camat Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon menjelaskan bahwa untuk mencegah sertifikat tanah palsu maka masyarakat perlu untuk mengurus sertifikat tanahnya.

“Saat ini banyak masyarakat dari luar Kecamatan Sewon yang membeli tanah di sini. Bisa untuk tinggal disini, artinya sebagai pendatang ataupun untuk sekedar investasi . Hal ini membuat keberadaan tanah di wilayah ini harus ditertibkan. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah, maka penyuluhan diadakan.”⁵

Berikut merupakan kegiatan penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap IV :



Gambar 3.1. Kegiatan Penyuluhan Pemberdayaan Tanah Desa Tahap IV

Pengecekan kondisi tanah juga dilakukan Camat Sewon bekerjasama dengan kantor agraria. Kegiatan ini ditujukan untuk menindaklanjuti penyuluhan tentang pentingnya pengurusan sertifikat

⁵ Suryadi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

tanah. Adanya penyuluhan tentang pentingnya pengurusan sertifikat tanah ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sedangkan pengecekan dilaksanakan agar tidak ada tanah yang bermasalah di wilayah Kecamatan Sewon.

Pengecekan tidak dapat dilakukan oleh camat sendiri, melainkan harus ada pihak yang memahami tentang legalitas tanah. Hal inilah yang membuat camat bekerjasama dengan kantor agraria.

“Saat ini keberadaan tanah sangat penting. Tanah terbatas, sementara peminat meningkat karena jumlah penduduk tambah banyak. Utamanya tanah yang berbatasan dengan kecamatan lain. Kantor agraria adalah instansi yang berwenang dalam mengurus tanah. Jadi untuk melakukan pengecekan tanah, Camat Sewon melakukan kerjasama.”⁶

Tanah yang di cek adalah tanah-tanah yang berbatasan dengan kecamatan lain, tanah kas desa dan juga beberapa tanah di kecamatan yang dilakukan secara acak atau *random*. Kegiatan keagrariaan lainnya yang dilakukan Camat Sewon adalah penyuluhan pemberdayaan tanah desa yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

“Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap I dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2013 di Aula Kecamatan Sewon. Penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap II dilakukan di tempat yang sama tanggal 25 Mei 2013. Selanjutnya penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap III dilaksanakan 30 Agustus 2013 di Rumah Makan Pangtritis. Pada 17 november 2013 dilakukan penyuluhan pemberdayaan tanah desa tahap IV di Hotel Pondok Gajah”.⁷

Setiap tahunnya dari Balai Karantina Tumbuhan melakukan berkembangnya pengecekan hama dan penyakit tumbuhan yang ada di

⁶ Helmi Jamharis, Camat Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

⁷ Pujiyanto, Kasi Pelayanan Umum, Wawancara Tanggal 28 April 2014.

Kecamatan Sewon. Hal ini ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah pertanian yang ada di masyarakat Sewon. Berikut merupakan foto kegiatan tersebut :



Gambar 3.2. Pengecekan Hama Penyakit Tumbuhan di Kecamatan Sewon

Peningkatan kemandirian politik juga dilakukan oleh Camat Sewon. Kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kemandirian politik tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Kegiatan Kemandirian Politik

No	Tanggal	Kegiatan
1	02 Mei 2013	Seminar "Pentingnya Pendidikan Politik"
2	10 Desember 2013	Seminar "Kemerdekaan Politik"

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tanggal 02 Mei 2013 dilakukan seminar dengan tema “Pentingnya Pendidikan Politik”. Seminar selanjutnya dilaksanakan tanggal 10 Desember 2013. Nara sumber kedua seminar tersebut didatangkan dari Universitas Gadjah Mada. Kerjasama antara Camat Sewon dengan universitas tersebut sudah lama terjalin karena Kecamatan Sewon sering digunakan untuk Kuliah Kerja Nyata atau KKN.

“Seminar politik dilakukan sebagai pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami politik. Supaya masyarakat tidak buta politik. Kami ambil nara sumbernya dari UGM karena kebetulan mereka juga mahasiswanya banyak yang KKN di sini. Ini sebagai bentuk timbal balik dari merekalah”.⁸

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa jumlah pembinaan keagrariaan dan peningkatan kemandirian politik yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sewon sudah cukup banyak. Berkaitan dengan jumlah pembinaan keagrariaan sebanyak enam kegiatan sedangkan untuk peningkatan kemandirian politik sebanyak dua kegiatan. Dengan melihat kinerja yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, didalam menangani permasalahan-permasalahan Agraria, pengembangan pertanian, penyuluhan kemandirian politik pada masyarakat serta kerjasama guna pengembangan masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Maka penulis memberikan penilaian terhadap *Quantity of work* dari Camat Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul cukup baik.

⁸ Suryadi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

2. *Quality of Work*

Supardi, salah satu warga yang ada di Kecamatan Sewon menjelaskan bahwa berkaitan dengan kecepatan layanan yang diberikan, maka diketahui bahwa layanan yang diberikan cenderung lambat.

“Saya merasakan pelayanan di sini lambat. Ini saya rasakan ketika mengurus KTP. Untuk pengurusannya membutuhkan waktu dua hari dengan alasan para petugas yang menangani tidak ada di tempat. Kalau saya bandingkan dengan kecamatan lain maka nampaknya sini lebih lambat.”⁹

Lambatnya layanan yang dilakukan menurut Pujiyanto karena banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh petugas kecamatan. Hal ini membuat kadang para petugas kecamatan tidak berada di tempat, ataupun harus menyelesaikan mana yang menjadi prioritas lebih dahulu. Sementara masyarakat apabila meminta layanan pasti menginginkan pelayanan yang cepat.¹⁰

Berkaitan dengan lambatnya layanan, Wiranto juga menjelaskan bahwa pelayanan yang diberikan cenderung lambat. Berikut penjelasannya:

“Saya merasakan kecepatan layanan yang diberikan tergolong lambat. Contohnya urus KTP. Urus KTP minimal dua hari. Padahal tetangga saya yang tinggal di desa sebelah urus KTP Cuma satu hari. Nah saat saya minta buru-buru karena ingin saya gunakan untuk urus sertifikat rumah, malah tetap ga bisa buru-buru katanya”.¹¹

Hasil layanan yang diberikan menurut Supardi sudah baik. Ini nampak dari KTP maupun surat-surat yang diberikan sudah baik.

⁹ Supardi, Masyarakat Kecamatan Sewon, 28 April 2014.

¹⁰ Pujiyanto, Kasi Pelayanan Umum, Wawancara Tanggal 28 April 2014.

¹¹ Wiranto, Masyarakat Kecamatan Sewon, 28 April 2014.

Pemberian hasil kadang dilakukan dengan sikap tergesa-gesa. Kondisi ini membuat masyarakat yang menerima layanan menjadi kurang nyaman.

Berikut merupakan penjelasan dari Supardi :

“Pemberian hasil dilakukan dengan cara tergesa-gesa. Seperti buru-buru gitu tanpa memberikan penjelasan kenapa koq lama prosesnya. Tidak adanya penjelasan membuat saya tidak paham kondisi yang sebenarnya. Hal ini tentu saja membuat saya merasa tidak nyaman dan kurang suka akan pelayanan yang diberikan”.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara *quality of work* nampak bahwa kecepatan layanan yang diberikan maupun hasil layanannya kurang baik. Pelayanan yang diberikan dianggap lambat sedangkan pemberian layanan dianggap tergesa-gesa sehingga kurang memperhatikan kenyamanan masyarakat.

3. *Job Knowledge*

Pemahaman tentang peran yang dimiliki nampaknya telah dipahami oleh para petugas Kecamatan Sewon. Berikut penjelasannya :

“Peran yang kami miliki sudah kami pahami karena setiap enam bulan sekali ada pembinaan dari Kabupaten berkaitan dengan koordinasi peran dan fungsi kecamatan. Di sana kami melaporkan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan sekaligus mendapatkan informasi tentang peran dan fungsi kecamatan dalam memajukan wilayah.”¹³

¹² Supardi, Masyarakat Kecamatan Sewon, 28 April 2014.

¹³ Suryadi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

Berikut merupakan gambar dari kegiatan pembinaan yang telah dilakukan :



Gambar 3.3. Kegiatan Pembinaan dari Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul mengadakan koordinasi Peran dan Fungsi Camat pada 21 Juni 2013 dan 30 Desember 2013. Camat Sewon hadir pada saat kegiatan tersebut karena dianggap memberikan mamnfaat bagi Kecamatan Sewon untuk dapat memahami peran dan fungsinya secara benar. Pada kegiatan tersebut juga biasanya antar camat saling bertukar informasi tentang perkembangan wilayahnya sehingga memungkinkan pemahaman tentang pengalaman baru yang diperoleh dari camat lainnya.

“Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bantul tersebut selalu diikuti oleh Camat sewon maupun beberapa petugas kecamatan. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai informasi terbaru yang relefan dengan kecamatan serta pemahaman tentang tugas yang dimiliki menjadi terus meningkat.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Camat Sewon berusaha untuk meningkatkan pemahaman dirinya maupun anak buahnya

tentang peran dan fungsi kecamatan. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan camat maupun petugas kecamatan dalam kegiatan yang dilakukan Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Kabupaten Bantul.

4. *Creativeness*

Inovasi yang dimiliki oleh Camat Sewon sudah baik.. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan aliran sungai yang ada di desa untuk budi daya ikan. Menurut Pujiyanto adanya inovasi ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan bersih-bersih sungai sehingga kami galakan slogan ‘Sungaiku Bersih, Sungaiku Lestari’. Setelah sungai bersih, maka menghimbau kepada para ibu untuk secara berkelompok membudidayakan ikan. Adanya budi daya ikan ini dilakukan agar meningkatkan ekonomi keluarga atau setidaknya meningkatkan gizi keluarga.”

Pemberdayaan dilakukan secara berkelompok agar tidak mensita waktu yang dimiliki oleh para ibu. Waktu pemberian pakan dilakukan secara bergantian sehingga tidak merepotkan dan para ibu dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya.

Adanya kegiatan tersebut telah membuat pengembangan yang dilakukan di wilayah kecamatan. Secara ekonomi memang hasilnya belum begitu dirasakan karena program pengembangan sungai tersebut baru dimulai pada bulan Mei 2013. Namun pengembangan gizi sudah dapat dirasakan. Mulai bulan Agustus, setiap bulannya warga Desa Pendowoharjo yang erlibat dalam pengembangan budidaya ikan mendapatkan lima ekor ikan yang dapat dikonsumsi untuk

meningkatkan gizi keluarga.

“Saya rasakan budidaya ikan ini memberi manfaat untuk pengembangan gizi keluarga kami. Memeliharanya juga tidak sulit karena kami memberi pakan secara bergantian. Memberi pakan seminggu sekali, karena kelompok kami terdiri dari tujuh orang. Tidak terlalu merepotkan, lima menit juga selesai. Nah, akhir bulan kami ambil ikannya lima ekor.”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa kreativitas yang dilakukan Camat Sewon memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Peningkatan gizi mulai dirasakan masyarakat yang terlibat dalam budidaya ikan. Pelaksanaan kegiatan budidaya juga tidak terlalu merepotkan para ibu karena untuk memberi pakan hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit.

5. Cooperation

Pada hakikatnya koordinasi adalah manifestasi dari kerjasama berbagai unit atau satuan kerja dalam koordinasi. Dalam hal ini koordinasi bergerak sebagai suatu sistem yang terpadu dan serasi atas dasar atau azas koordinasi. Unit atau satuan kerja organisasi tersebut saling membutuhkan atau terciptanya kondisi ketergantungannya untuk mendorong usaha kerja sama.

Fungsi Camat dalam hal pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, kecamatan ditunjuk untuk lebih mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan cara menyerap semua aspirasi dari masyarakat adalah program

¹⁴ Winarti, Masyarakat Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 29 April 2014.

perencanaan pemberdayaan masyarakat dan lebih diutamakan bukan pola atau penerapan kebijakan hanya dari atasan, sehingga dengan pola tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat menjamin serta membentuk keserasian dan keterpaduan dalam suatu tujuan dan bekerjanya aparatur pemerintahan maka diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang dapat berwujud suatu peraturan tata tertib dan kerja sama secara keseluruhan. Dengan adanya rapat para pimpinan dan rapat pimpinan dengan bawahan sangat penting dalam suatu organisasi atau instansi karena didalam pelaksanaan rapat tersebut akan dapat tukar menukar pendapat, tukar menukar inspirasi dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian rapat-rapat cara berkala sangat diperlukan demi terciptanya dinamika organisasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya koordinasi karena pada prinsipnya tujuan koordinasi itu adalah untuk mengatur secara tertib dan seirama kegiatan-kegiatan yang ada dalam koordinasi. Guna tercapainya kesatuan tindakan dan kesatuan gerak guna menghindari terjadinya konflik maupun kekosongan dalam pekerjaan serta untuk mengarahkan kepada satu tujuan yaitu tercapainya tujuan organisasi yang baik.

Dengan demikian Camat sangat perlu untuk mengadakan pengkoordinasian baik dengan bawahan maupun instansi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar struktur organisasi Kecamatan Sewon

yang ada pada bab II. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan oleh Camat yaitu rapat untuk membahas program-program apa saja yang ingin dilaksanakan. Yang mana program-program yang sudah direncanakan atau usulan dari masing-masing Kelurahan yang berbasis masyarakat kampung. Camat selalu memberikan arahan terhadap pentingnya tujuan yang ingin dicapai. Agar dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat yang diperlukan kerjasama yang baik. Pada koordinasi Camat dibidang pemberdayaan masyarakat tidak menutup kemungkinan dengan keikutsertaan/ keterkaitan dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait.

Camat Sewon juga melakukan koordinasi Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengenai peningkatan usaha masyarakat. Koordinasi bersama pihak yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat, bekerja sama antara Camat, Lurah dan PNPM Mandiri. Disini yang menjadi tugas PNPM Mandiri adalah sebagai pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang telah dibuat sebagai *entry point* (poin utama) untuk menggali kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sendiri sebagai bentuk tanggung jawab bermasyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

PNPM Mandiri sebagai pelaksana program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat dan juga sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat

banyak kontribusi yang diberikan. Selain pendanaan juga sebagai salah satu pihak yang memonitoring berjalannya program supaya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan uraian di atas bentuk koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat program yang dilakukan antara Camat, Lurah dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat berupa rapat atau meeting yang telah direncanakan sebulan sekali atau bisaanya lebih tergantung situasi pada saat itu. Kondisi informal dilakukan secara langsung terjun kelapangan sehingga dapat melihat sejauh mana perkembangan yang terjadi di lapangan mengenai program yang telah dilaksanakan.

Program yang telah dilaksanakan hendaknya pula dapat dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat merupakan faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Camat, Lurah dan staf Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama menyusun program penanggulangan kemiskinan yang berpihak terhadap masyarakat miskin dengan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, mewujudkan masyarakat Madani yang berdaya guna dan berhasil guna dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan secara mandiri serta mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kecamatan Sewon dalam waktu 3 tahun kedepan. Yaitu dengan cara memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan TRIDAYA dan berbasis nilai-nilai luhur kemanusiaan, meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam hal gerakan penanggulangan kemiskinan secara bersama, dan meningkatkan kesadaran SDM (sumber daya manusia), taraf hidup masyarakat, mendorong masyarakat peduli dalam hal pengembangan sosial, lingkungan dan ekonomi.

Adanya program nasional pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kemasyarakatan, diharapkan masalah kemiskinan diwilayah Kecamatan Sewon dapat dikurangi. Didalam penjabarannya dari misi kegiatan ini diarahkan kepada TRIDAYA yang meliputi 3 bidang kegiatan yaitu:

a. Bidang Ekonomi

- 1) Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat.
- 2) Memberikan tambahan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil.
- 3) Terwujudnya organisasi usaha bersama.

b. Bidang Sosial

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
- 2) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial bersama.

c. Bidang Lingkungan

- 1) Memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan.
- 2) Menciptakan pemukiman yang sehat dan layak huni.

Berbagai kerjasama telah dilakukan dengan instansi terkait,

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3. Bentuk Kerjasama¹⁵

No	Instansi	Bentuk Kerjasama
1	Fakultas Perikanan dan Peternakan UGM	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan bibit dan pemantauan kesehatan ikan pada budidaya yang dikembangkan di Sewon. - Pengecekan terhadap kesehatan hewan piaraan yang ada di Kecamatan Sewon.
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM	Pendidikan politik masyarakat Sewon.
3	Hotel Pondok Gajah	Kerjasama dalam menyediakan tempat untuk seminar atau pelatihan yang menunjang pengembangan Kecamatan Sewon.
4	Fakultas Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberantas buta huruf di Kecamatan Sewon. - Menciptakan bersih desa. - Membangun toilet layak pakai di desa-desa.
5	Balai Karantina Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan hama penyakit tumbuhan di Kecamatan Sewon. - Konseling untuk petani yang mengalami masalah pada tanaman pertaniannya. - Seminar tentang pertanian.

Budidaya ikan yang diterapkan di Kecamatan Sewon dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Peternakan UGM. Artinya untuk penyediaan bibit kecamatan tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya. Hanya saja perlu kerjasama dengan masyarakat berkaitan dengan tempat penangkaran ikannya. Akhirnya Camat Sewon melakukan kerjasama untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menangkan ikan. Pembuatannya dilakukan masyarakat bekerjasama dengan mahasiswa yang KKN di wilayah tersebut.

¹⁵ Data Administrasi Kecamatan Sewon 2014.

Pengecekan terhadap kesehatan hewan piaraan yang ada di Kecamatan Sewon juga dilakukan dengan melakukan kerjasama. Saat KKN, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Peternakan UGM diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan piaraan yang ada di Kecamatan Sewon. Tidak jarang juga ada dokter hewan yang KKN di wilayah Sewon ikut dilibatkan.

Seminar tentang pendidikan politik yang dilaksanakan di Kecamatan Sewon juga dilakukan dengan kerjasama. Camat Sewon bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Adanya kerjasama ini memudahkan Camat Sewon dalam mengembangkan pemahaman tentang pentingnya pemilu kepada masyarakat. Terlihat saat pemilu 2014 pelaksanaan pemilu di Kecamatan Sewon sudah berlangsung secara tertib.

Keberadaan Hotel Pondok Gajah di wilayah Kecamatan Sewon membantu Camat Sewon untuk melakukan kerjasama dengan hotel tersebut secara mudah. Kerjasama dilakukan dalam bentuk menyediakan tempat untuk seminar atau pelatihan yang menunjang pengembangan Kecamatan Sewon. Artinya, saat memerlukan ruang rapat atau ruang seminar maka Camat Sewon tidak perlu kesulitan mencari tempat yang nyaman dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan.

Guna memberantas buta huruf di Kecamatan Sewon, menciptakan bersih desa, serta membangun toilet layak pakai di desa-desa dilakukan oleh Camat Sewon melalui kerjasama dengan Fakultas

Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Kerjasama tersebut dilaksanakan saat ada mahasiswa yang KKN sehingga masyarakat juga terlibat didalamnya.

Kecamatan Sewon juga bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian dalam melakukan pengecekan hama penyakit tumbuhan di Kecamatan Sewon serta konseling untuk petani yang mengalami masalah pada tanaman pertanian, serta seminar tentang pertanian. Berikut merupakan seminar pertanian yang dilakukan :



Gambar 3.4. Seminar Pertanian di Kecamatan Sewon

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa Camat Sewon telah melakukan kerjasama yang terkait dengan instansi lain. Kerjasama dilakukan dengan Fakultas Perikanan dan Peternakan UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Hotel Pondok Gajah, Fakultas Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, serta Balai Pertanian Semarang.

6. *Dependability*

Kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap Kecamatan Sewon sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.

“Contoh realnya adalah kami percaya bahwa Camat Sewon bisa memajukan masyarakat sini sehingga kegiatan budidaya yang Beliau kemukakan langsung mendapat respon positif dari masyarakat. Saat menggalakan bersih sungai juga masyarakat mendukungnya. Apalagi sebelum pelaksanaan sudah diberi pemahaman dari kecamatan untuk mengantisipasi banjir maka kegiatan ini perlu dan mendapat dukungan dari masyarakat.”¹⁶

Kesadaran untuk menyelesaikan tugas dan peran di kecamatan juga sudah dimiliki oleh petugas Kecamatan Sewon. Menurut Suryadi, pemahaman yang diperoleh petugas Kecamatan Sewon telah membuat petugas menyadari bahwa untuk memajukan wilayah kecamatan tersebut, maka tidak dapat menggantungkan pada ide-ide dari Kabupaten Bantul, melainkan butuh kepekaan para petugas kecamatan untuk dapat mengembangkan dan memajukan masyarakat di wilayah kecamatan.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap Kecamatan Sewon sangat besar. Kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan dukungan masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sewon.

¹⁶ Winarti, Masyarakat Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 29 April 2014.

¹⁷ Suryadi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

7. *Initiative*

Keinginan untuk memajukan Kecamatan Sewon pada akhirnya telah membuat dikembangkannya budidaya ikan di desa-desa yang dialiri sungai di Kecamatan Sewon. Hal ini memiliki dampak yang baik karena mampu membantu peningkatan gizi pada keluarga yang ikut serta dalam mengembangkan budidaya ikan.

Inisiatif ini berawal dari keinginan untuk menciptakan sungai yang bersih sdi wilayah Sewon. Adanya sungai yang bersih diharapkan dapat meminimalisir banjir yang mungkin terjadi karena penyumbatan aliran sungai. Untuk menstimulus keinginan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, maka muncullah ide untuk menggunakan aliran sungai sebagai budidaya ikan.

“Kami merasa kesulitan jika menghimbau masyarakat untuk terus menjaga kebersihan sungai. Umumnya sungai malah dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal sudah ada beberapa tempat yang disediakan untuk membuang sampah. Pada akhirnya muncul ide agar menggunakan aliran sungai untuk budidaya ikan. Ini secara otomatis akan membuat masyarakat menjaga kebersihan sungai.”¹⁸

Pada akhirnya terwujudlah keinginan untuk membuat perubahan yang baru di Kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon tidak hanya mengembangkan kerajinan patung kayu primitive di Desa Pucung, kerajinan kulit di Bangunjiwo, mengembangkan industri tempe di Desa Bangunharjo dan Desa Pendowoharjo, namun juga mulai melakukan budidaya ikan air tawar. Saat ini memang baru bermanfaat untu

¹⁸ Pujiyanto, Kasi Pelayanan Umum, Wawancara Tanggal 28 April 2014.

pemenuhan kebutuhan peningkatan gizi masyarakat belum mampu meningkatkan perekonomian keluarga secara signifikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa inisiatif telah dimiliki Kecamatan Sewon. Pada akhirnya terwujudlah keinginan untuk membuat perubahan yang baru di Kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon tidak hanya mengembangkan kerajinan patung kayu primitive di Desa Pucung, kerajinan kulit di Bangunjiwo, mengembangkan industri tempe di Desa Bangunharjo dan Desa Pendowoharjo, namun juga mulai melakukan budidaya ikan air tawar.

8. *Personal Qualities*

Keramahan nampaknya kurang dimiliki oleh Camat Sewon. Hal ini nampak dari pernyataan yang dikemukakan oleh warga sebagai berikut:

“Saya rasa keramahan kurang ditunjukkan oleh camat. Kegiatan yang dilakukan mungkin banyak sehingga kadang terlihat kurang ramah kepada individu lain. Contohnya saja saat lewat, camat hanya tersenyum dan tidak menyapa. Sepertinya jalannya bergegas.”¹⁹

Kesibukan yang dimiliki camat sering membuat ketegangan dalam diri camat sehingga terkadang kurang menunjukkan sikap yang ramah kepada masyarakat. Namun kemampuan dalam memimpin maupun kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan bawahan menurut Suryadi sudah baik.

¹⁹ Winarti, Masyarakat Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 29 April 2014.

“Kerja camat itu susah. Bukan hanya mengurus program yang ada di kecamatan namun juga menjalin kerjasama dengan instansi maupun koordinasi dengan kabupaten. Hal ini yang terkadang membuat camat terlihat sibuk dan kurang ramah. Apalagi menjelang pemilu begini. Tapi kalau tentang kemampuan dalam memimpin maupun kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan bawahan sudah baik. Camat dalam memberi instruksi sudah jelas dan mudah dipahami”²⁰

Kurang ramahnya Camat Sewon menurut Pujiyanto karena banyaknya kegiatan yang dilakukan di Kecamatan.

“Menurut saya memang camat Sewon kadang kurang ramah. Ini bukan apa-apa tetapi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan di Kecamatan sementara masyarakat yang membutuhkan pelayanan di kecamatan terkadang maunya terburu-buru. Jadi terkadang masyarakat merasa diabaikan keberadaannya”.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa *personal qualities* yang dimiliki dianggap masih kurang ramah. Namun Camat Sewon sudah memiliki kemampuan dalam memimpin maupun kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan bawahan.

9. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kinerja

Hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya tidak mempunyai kendala yang berarti, namun biaya untuk program tersebut seharusnya dilakukan sebulan sekali atau per-triwulan jadi terhambat karena biaya yang diperlukan datanganya pada akhir tahun atau satu tahun sekali.

²⁰ Suryadi, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sewon, Wawancara Tanggal 25 April 2014.

Setiap program kerja pasti memiliki tujuan. Tujuan yang ditetapkan dan selalu diharapkan dengan apa yang diinginkan tersebut perlu faktor pendukung yang utama, yaitu manusia sebagai pelaksanaannya. Tujuan bersama mengutamakan bagaimana pelaksanaan dan peningkatan mutu pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal untuk itu salah satu hambatan yang dihadapi adalah masalah anggaran yang seharusnya dapat dicari jalan solusinya, sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang dicapai.

B. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, maka dalam pembahasannya hanya menggambarkan dan menjabarkan fenomena data yang diperoleh di lapangan yang didukung oleh hasil wawancara dengan Camat di Kecamatan Sewon, Kasi Pelayanan Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial, serta dua orang masyarakat Kecamatan Sewon.

Camat Sewon dianggap sudah memiliki *quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative* yang sudah baik. Namun berkaitan dengan *quality of work* maupun *personal qualities* dianggap masih kurang baik. Tingkat kecepatan layanan yang dilakukan dianggap masih tergolong lambat dan juga kurang menunjukkan sikap ramah saat memberikan pelayanan. Kondisi ini membuat masyarakat kurang merasakan kenyamanan saat mendapatkan pelayanan.

Rapat koordinasi di Kecamatan Sewon menjadi tempat untuk menukar pendapat, tukar menukar aspirasi dan penyampaian permasalahan dalam pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan pendapat G.R. Terry yang menjelaskan bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.²¹

²¹ Fandeli Chafid, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Yogyakarta, Liberty, 2005, Hlm.81.

Keberadaan rapat koordinasi yang ada di Kecamatan Sewon tentu saja diharapkan mampu mendapatkan kesesuaian terhadap sebuah pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh hasil terhadap target yang telah ditentukan. Rapat koordinasi lebih sering diadakan secara mendadak karena apabila ada masalah yang perlu diselesaikan segera dapat dipecahkan dan memberikan jalan keluar. Apabila rapat koordinasi telah terlaksana dengan baik maka selanjutnya perlu mengadakan evaluasi pelaksanaan tentang program, untuk mengkaji ulang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan rapat koordinasi sering dilakukan tanpa jadwal yang teratur disebabkan permasalahan yang ada terkadang datang secara tiba-tiba dan butuh pemecahan segera. Rapat koordinasi didalamnya terdapat upaya untuk peningkatan kerjasama antara camat dengan staf kecamatan dan berusaha untuk mewujudkan hubungan baik antara Camat dan Lurahnya, adanya saling menghargai agar tercipta kerjasama yang baik dan harmonis.

Camat menurut Fitiani adalah seseorang yang dipilih dan dipercayakan untuk mengatur daerah kecamatan.²² Camat beserta staf kecamatan selalu terlibat dalam perencanaan program pemberdayaan disini dibuktikan dengan keseriusan para pemerintahan dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat. Hubungan antara pihak yang terlibat didalamnya seperti pihak Camat, Lurah dan staf kecamatan, ini dapat dilihat dengan saling mendukung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat mensejahterakan rakyat.

²² Abdul Wahap Solihin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000, Hlm.63.

Teguh menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat secara etimologis pemberdayaan masyarakat berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat selain tugas pokok Camat dalam bidang sosial dan kesejahteraan rakyat, tugas Camat lain yaitu pembinaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :²³

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap organisasi kepemudaan yang berada dibawah naungan Kecamatan kepada sasaran positif sehingga organisasi kepemudaan dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Melakukan pemberdayaan terhadap keluarga miskin/ keluarga tidak mampu kepada keluarga yang lebih sejahtera.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan kepemudaan organisasi sosial/LPM sehingga melakukan kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri melakukan provokasi di kalangan masyarakat yang melibatkan perpecahan.
- d. Pembinaan kegiatan pembangunan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat didalam dunia usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan berupa mengenai masalah-masalah sosial yang terdapat dilingkungan masyarakat dengan cara mengarahkan mereka kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, Selain itu

²³ Teguh, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, Hlm.52.

dengan membuka kursus-kursus keterampilan kepada para pemuda yang belum bekerja sehingga mereka mempunyai keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan. Bentuk pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat disini terlihat dari semakin meningkatnya prestasi kerja masyarakat dalam usaha kecil menengah dan usaha-usaha lainnya.

Manfaat tersebut pada dasarnya sesuai dengan apa yang Setiana jelaskan bahwa pada dasarnya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai pelaksana program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat dan juga sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sangat banyak kontribusi yang diberikan. Selain pendanaan juga sebagai salah satu pihak memonitoring berjalannya program supaya berjalan dengan baik dan lancar. Strategi yang dilaksanakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pengembangan aspirasi, aspirasi dan partisipasi masyarakat (*bottom up approach*), pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan perkampungan/ pedesaan (*rural and urban community approach*), berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat (*prosperity approach*), pendekatan lintas sektor dan program (*cross sektor and program approach*), dan penerapan teknologi tepat guna (*appropriate technology approach*) ramah lingkungan.

²⁴ *Op.Cit.* Hlm.97.

Kegiatan atau aktivitas merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk evaluasi dalam memperbaiki program kerja operasional yang berdimensi waktu 5 tahunan. Dengan demikian aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran sasaran dan tujuan yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Perhatian utama dari aktivitas akan terlihat pada tugas dan fungsi program kerja dan menjadi aktivitas dominant bagi pencapaian visi dan misi. Aktivitas merupakan cermin dari strategi konkrit organisasi untuk implementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program yang telah ditetapkan dapat bersifat jangka panjang dan menengah, yaitu memiliki tenggang waktu antara 3 sampai 5 tahun atau bersifat tahunan saja. Penyusunan program jangka menengah didasarkan atas visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka diketahui bahwa fungsi, tugas, dan wewenang camat yaitu (1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan pelayanan umum; (4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat

kecamatan; (6) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan; dan (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Adanya fungsi, tugas, dan wewenang camat sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 membuat di era otonomi daerah, terdapat semangat besar untuk merubah kondisi masyarakat dalam mengantarkan kearah proses pembangunan lebih mandiri, namun dibalik itu konsekuensinya bahwa masyarakat juga semakin dituntut dan harus difasilitasi untuk menggali kemampuan dalam melaksanakan pembangunan dengan program-program yang tepat sasaran secara efektif dan efisien.

Kebijaksanaan yang telah ditetapkan merupakan pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, oleh karenanya pemilihan dan penetapan kebijaksanaan dilakukan dengan hati-hati yang akan diharapkan dapat mempertajam strategi serta menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang diambil dan dapat mendukung cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Pemerintah daerah diharap bersungguh-sungguh memberdayakan masyarakat melalui pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek utama, tidak saja pada tataran kebijakan akan tetapi juga dengan tataran praktis yang melalui pembinaan-pembinaan oleh instansi teknis. Kebijakan Umum dalam Pemberdayaan Masyarakat diarahkan kepada:²⁵

²⁵ Pujiyanto, Kasi Pelayanan Umum, Wawancara Tanggal 28 April 2014.

- a. Pemberian peluang atau akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama asset produksi atau modal.
- b. Penguatan posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi produktif dengan pihak luar. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. Penguatan sentra-sentra industri kecil yang berbasis wirausahaan yang baru.
- d. Pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.

Kebijakan operasional yang lebih diarahkan untuk mendorong masyarakat dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan urusan publik dengan membuka ruang untuk mengambil keputusan melalui perubahan kondisi, ikut serta dalam menciptakan inspirasi dan inisiatif-inisiatif lainnya. Hal ini sulit terealisasi tanpa adanya pengorganisasian masyarakat yang kuat, independent dan swasembada.

Kebijakan Operasional dalam Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan pada :

- a. Menggali potensi intelektual dan kemampuan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan pada setiap tahap proses pembangunan.
- b. Pemanfaatan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan fisik masyarakat sebagai jembatan terciptanya peran dan partisipasi masyarakat.

Melaksanakan program atau kegiatan yang sudah disepakati dengan masyarakat, sehingga kebijakan ini sebagai entry point (point utama) untuk menggali kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sendiri sebagai bentuk tanggung jawab bermasyarakat, yang pada akhirnya mengarah terwujudnya kemandirian masyarakat.

Adanya program tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mencapai apa yang telah direncanakan diharapkan dapat tercipta kerja sama yang baik antara Camat, Lurah, dan staf kecamatan.

Tujuan pelaksanaan program selain peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas masyarakat sehingga dengan adanya program ini manusia dapat lebih mandiri dengan peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang produktif.

Kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu masalah biaya untuk program tersebut seharusnya dilakukan sebulan sekali atau per-triwulan jadi terhambat karena biaya yang diperlukan datangnya pada akhir tahun atau satu tahun sekali, dan kendala lainnya sarana dan prasarana perlengkapan yang belum memadai sehingga kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang ditetapkan dan selalu diharapkan dengan apa yang diinginkan tujuan tersebut perlu faktor pendukung yaitu manusia sebagai pelaksanaannya. Tujuan bersama mengutamakan bagaimana pelaksanaan dan peningkatan mutu pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal. Untuk itu salah satu hambatan yang dihadapi adalah masalah anggaran yang seharusnya dapat dicari jalan solusinya, sehingga program-program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.